

ABSTRAK

Revitalisasi peran dan fungsi partai politik merupakan sentral dan jawaban utuh atas pertumbuhan dan perkembangan berbagai partai politik di masa sekarang. Hal tersebut terbukti dalam ruang lingkup transparansi dan akuntabilitas yang terbilang masih banyak partai politik yang cacat akan hal tersebut. Oleh karenanya, indeks akuntabilitas keuangan partai politik merupakan suatu hal yang absolut bagi keberlangsungan kehidupan partai yang tidak sedikit mendapat bantuan dana dari masyarakat.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah normatif, yang mana menitikberatkan penelitian terhadap norma hukum yang terkait dengan sebuah peristiwa hukum dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan untuk sumber data berasal dari data primer yang diperoleh secara langsung dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yang merupakan pengkajian terhadap informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber. Lalu metode analisisnya dilakukan dengan menggunakan interpretasi atau penafsiran guna membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kebijakan transparansi dan akuntabilitas Partai Demokrat Kota Surabaya dalam pengelolaan dan penggunaan bantuan keuangan partai politik sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang tata cara perhitungan, penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan tata tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik. Selain itu, upaya Partai Demokrat dalam meningkatkan eksistensinya dalam mewujudkan kebijakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan penggunaan bantuan keuangan juga dinilai sesuai dengan peraturan yang ada, dimana Partai Demokrat sudah menjalankan kewajibannya sesuai dengan pengaturan penyaluran bantuan keuangan.

Kata kunci: Transparansi – Akuntabilitas – Partai Politik

ABSTRACT

The revitalization of the role and function of political parties is the central and complete answer to the growth and development of various political parties in the present. This is evident in the scope of transparency and accountability where there are still many political parties that are flawed in this regard. Therefore, the financial accountability index of political parties is an absolute thing for the survival of the party, which receives a lot of financial assistance from the public.

The type of research used is normative, which focuses on research on legal norms related to a legal event using a statute approach and a conceptual approach. As for the source of data derived from primary data obtained directly and secondary data obtained indirectly. The data collection technique is through a literature study, which is an assessment of written information about law originating from various sources. Then the method of analysis is carried out using interpretation or interpretation in order to build a legal argument as a conclusion.

The results of the study show that the transparency and accountability policy of the Surabaya City Democratic Party in managing and using political party financial assistance is in accordance with Permendagri Number 36 of 2018 concerning procedures for calculations, budgeting in the regional income and expenditure budget, and administrative procedures for submitting, distributing, and accountability reports on the use of political party financial assistance. In addition, the Democratic Party's efforts to increase its existence in realizing policies of transparency and accountability in the management and use of financial assistance are also considered to be in accordance with existing regulations, where the Democratic Party has carried out its obligations in accordance with the arrangements for distributing financial assistance.

Keywords: *Transparency – Accountability – Political Parties*